



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 33 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 15 Tahun 2015;
- b. bahwa guna mengoptimalkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah, dilakukan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 untuk mengetahui perkembangan keadaan sampai dengan semester pertama;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cianjur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 2 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 36 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 36 Seri D);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 07A Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Kabupaten Cianjur untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KU-PAPBD) Tahun 2016 dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPAS P-APBD) Tahun 2016.

9. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 2

Sistematika Penyusunan Perubahan RKPD adalah sebagai berikut:

- a. Daftar Isi
- b. Daftar Tabel
- c. Daftar Gambar
- d. Bab I Pendahuluan
 1. Latar Belakang
 2. Maksud dan Tujuan
 3. Landasan Hukum
 4. Hubungan Antar Dokumen
 5. Sistematika
- e. Bab II Evaluasi Hasil RKPD
 1. Evaluasi Perkembangan Ekonomi Daerah Triwulan II Tahun 2016
 2. Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD dan Realisasi APBD Tahun 2016
 3. Permasalahan dan Tantangan Tahun 2016
 - a) Permasalahan
 - b) Tantangan
- f. Bab III Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Dalam Perubahan RKPD
 1. Kegiatan Lanjutan RKPD Murni Tahun 2016, Penghapusan Kegiatan, Penambahan Kegiatan Baru/Kegiatan Alternatif
 2. Pergeseran Kegiatan Internal dan Antar OPD
 3. Perubahan Target Kinerja, Pagu Indikatif
 - a) Perubahan Target Kinerja
 - b) Perubahan Pagu Indikatif
 4. Rencana Kegiatan Prioritas Daerah
- g. Bab IV Penutup

Pasal 3

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN

Pasal 4

- (1) Perubahan RKPD bertujuan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, sektor pembangunan, dan tingkat pemerintahan serta untuk mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya pembangunan daerah.
- (2) Sasaran Perubahan RKPD adalah sebagai acuan dan pedoman pembangunan di daerah tahun 2016.
- (3) Fungsi Perubahan RKPD adalah:
 - a. bagi OPD merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja;
 - b. bagi Pemerintah Daerah merupakan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2016.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 29 Juli 2016

BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 29 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CIANJUR,

OTING ZAENAL MUTAQIN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2016 NOMOR 34



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR : 33 TAHUN 2016

TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN
2016

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Cianjur merupakan upaya terencana untuk pelibatan dan pemberdayaan masyarakat dalam mengoptimalkan kapasitas serta potensi sumberdaya yang dimiliki guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Cianjur. Perencanaan pembangunan diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan pembangunan Tahun 2016 merupakan tahun kelima dari pelaksanaan RPJMD Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2016, yang ditujukan untuk memantapkan kesejahteraan masyarakat yang berakhlakul karimah.

Untuk menjamin keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, maka perlu disusun Perubahan RKPD Kabupaten Cianjur Tahun 2016 sebagai dokumen perencanaan tahunan, sebagai landasan penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2016, dan juga merupakan acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyempurnakan Rencana Kerja (RENJA) OPD Tahun 2016.

Perubahan RKPD Tahun 2016, berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016, untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2016, yaitu: "Cianjur Lebih Sejahtera dan Berakhlakul Karimah". Perubahan RKPD Tahun 2016 merupakan acuan dalam menyusun Perubahan APBD yang mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Perubahan RKPD perlu dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2016 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: (1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah; (2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau; (3) Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; (4) Pergeseran pagu kegiatan antar OPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

1.1. Kerangka Perekonomian Daerah

Kabupaten Cianjur pada tahun 2016 menargetkan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) di atas 5,17% dan inflasi sebesar 5%. Target laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi ini diharapkan bisa tercapai karena ditunjang oleh peningkatan investasi dari tahun 2010 - 2015 serta kegiatan tahun berjalan 2016. Investasi dari sumber domestik maupun dari luar Cianjur ini memungkinkan Kabupaten Cianjur dapat meningkatkan akumulasi modal dan produksi yang pada akhirnya dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Skenario pertumbuhan ekonomi yang positif tersebut diharapkan menjadi solusi pemecahan dalam penyerapan tenaga kerja, menurunkan kemiskinan, pemerataan pendapatan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan kondisi di atas, asumsi dasar pertumbuhan ekonomi sampai dengan triwulan ke dua di atas 5,17% dan inflasi 5-6%.

1.2. Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016

Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2016, dibuat berdasarkan hasil evaluasi RKPD dan RENJA OPD Tahun 2016, dengan memperhatikan tantangan dan perkembangan kondisi daerah Tahun 2016, serta hasil evaluasi pelaksanaan APBD Triwulan II, yang menghasilkan Dokumen Draf I Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2016.
2. Pembahasan Draft I (satu) Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2016, dengan OPD dan *stakeholders*, tentang justifikasi substansi dan program/kegiatan, serta pembiayaan yang akan dilaksanakan dalam Perubahan RKPD Tahun 2016, yang menghasilkan Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2016.
3. Pelaksanaan Verifikasi untuk membahas Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2016, yang menghasilkan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2016.
4. Penerbitan Peraturan Bupati Cianjur tentang Perubahan RKPD Tahun 2016.

2. Maksud dan Tujuan

2.1. Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 adalah sebagai pedoman untuk penyempurnaan Rencana Kerja OPD Tahun 2016, penyusunan Kebijakan Umum (KU) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 serta Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2016.

2.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 adalah mewujudkan konsistensi dan sinergi perencanaan dan penganggaran Kabupaten Cianjur.

3. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Cianjur Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas dan wewenang serta kedudukan keuangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014 – 2019;
15. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 07A Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 5);

22. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 57 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2016;
23. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016.

4. Hubungan Antar Dokumen

Perubahan RKPD Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan operasional untuk pedoman perubahan perencanaan dan penganggaran tahun 2016, sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa RKPD merupakan pedoman Penyusunan KUA-PPAS dan dalam hal Perubahan RKPD pada Tahun 2016 didasarkan kepada hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2016 sampai dengan Triwulan II, adapun kondisi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi: (1) Perkembangan yang tidak sesuai untuk asumsi kerangka ekonomi daerah yang telah ditargetkan di dalam RKPD Tahun 2016, kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah; dan (2) Berdasarkan hasil estimasi pelaksanaan kegiatan dan prognosis kegiatan sampai akhir pelaksanaan kegiatan dan adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Berdasarkan kondisi di atas, diperlukan perubahan berupa pergeseran kegiatan antar OPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, sehingga diharapkan dengan dilaksanakannya perubahan RKPD maka dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan dan penganggaran.

5. Sistematika

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cianjur Tahun 2016, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan, memuat/menjelaskan maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.

BAB II EVALUASI HASIL RKPD

Evaluasi hasil RKPD sampai dengan Triwulan II, memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2015 sampai dengan Triwulan II Tahun 2016.

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2016, memuat kegiatan lanjutan Tahun 2016, pergeseran kegiatan antar OPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan.

BAB IV PENUTUP

Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

BAB II
EVALUASI HASIL RKPD

1. Evaluasi Perkembangan Ekonomi Daerah Triwulan II Tahun 2016

Indikator makro di Kabupaten Cianjur ditentukan oleh Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Inflasi, dan Nilai PDRB adhk. Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cianjur pada Triwulan II menunjukkan kondisi stabil (mendekati akhir Tahun 2015), sejalan dengan perkembangan inflansi dan PDRB (Tabel 2.1). Kondisi ini mendukung dilakukannya percepatan pembangunan Tahun 2016, melalui penyesuaian-penyesuaian program dan kegiatan Tahun 2016.

Tabel 2.1.

REALISASI BEBERAPA INDIKATOR MAKRO EKONOMI
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2015-2016

No.	Indikator	RKPD 2015	Target RKPD Tahun 2016	Perkembangan 2016 (Triwulan II)
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,17	5 – 5,20	5,17
2	Inflasi (%)	5 – 6	5 – 6	6,03 (y-o-y April 2015)
3	Nilai PDRB adhk (Rp. Juta)	28.068.776,24	34.467.237,55	34.467.237,55

Sumber : BPS 2016, diolah

2. Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD dan Realisasi APBD Tahun 2016

Evaluasi terhadap dokumen Perubahan RKPD Tahun 2016 dan dokumen Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 dilakukan dengan menggunakan 5 (lima) parameter evaluasi, yaitu kesesuaian indikator kinerja, target kegiatan, judul kegiatan, lokasi kegiatan, dan anggaran kegiatan. Hasil analisis dari dokumen Perubahan RKPD Tahun 2016 dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, terhadap 5 parameter tersebut masih berada pada kisaran antara 1-10%, yang menunjukkan tingginya konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Cianjur.

Pelaksanaan Program/kegiatan dan realisasi Anggaran digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan daerah yang terbagi kedalam bidang urusan yaitu 26 Bidang Urusan Wajib dan 8 Bidang Urusan Pilihan. Kemudian dalam pencapaian prioritas pembangunan daerah sesuai tema dan arah kebijakan dalam menjawab isu strategis diarahkan pada sasaran strategis dalam pencapaian RPJMD.

3. Permasalahan dan Tantangan Tahun 2016

a) Permasalahan

Prioritas pembangunan Kabupaten Cianjur Tahun 2016, memfokuskan pada pencapaian akumulasi dari target RPJMD 2011-2016 sampai dengan Tahun 2016, dan pemenuhan janji Bupati, penuntasan pembangunan monumental yang belum selesai. Permasalahan penting dalam pembangunan Kabupaten Cianjur untuk meningkatkan daya saing daerah, memerlukan perubahan dari RKPD 2016 diantaranya adalah:

- 1) Aspek Kesejahteraan Masyarakat, meliputi bidang pendidikan diantaranya memerlukan akselerasi dalam pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) yang masih di bawah rata-rata nasional, dan belum tercapainya rata-rata lama sekolah; Perlunya meningkatkan daya beli masyarakat; perlunya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB); dan akselerasi penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran; pencetakan sawah baru dan peningkatan produksi padi dan ternak untuk peningkatan ketahanan pangan; perbaikan Rumah Tidak Layak Huni; serta penyelesaian Pasar Induk Kabupaten Cianjur.
- 2) Aspek Daya Saing Daerah, dalam meningkatkan daya saing daerah diperlukan akselerasi investasi; meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi; dan Penataan Destinasi Wisata;
- 3) Aspek Pelayanan Umum, pada aspek pendidikan diperlukan meningkatnya sarana prasarana pendidikan yang meliputi RKB, laboratorium, perpustakaan, dan persiapan alih kelola SMA/SMK dari Kabupaten Cianjur ke provinsi; pada aspek kesehatan permasalahan yang harus segera dituntaskan adalah pelayanan dasar dengan membangun Puskesmas DTP (Dengan Tempat Perawatan); dan Penyelesaian Rumah Sakit Pagelaran.

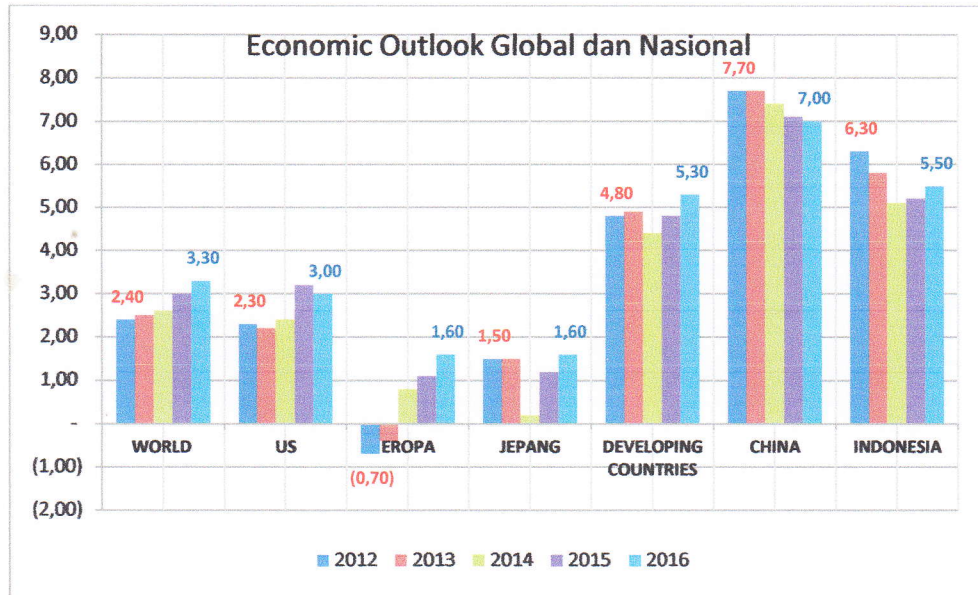
b) Tantangan

Tantangan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi global diprediksi akan meningkat dari 3,3 persen pada 2015 menjadi 3,8 persen pada Tahun 2016, dan 3,30 persen Tahun 2016. Begitupun dengan Amerika Serikat yang pertumbuhan ekonominya diperkirakan akan meningkat dari 2,2 persen menjadi 3,1 persen pada Tahun 2015, sedangkan Tahun 2016 diperkirakan turun menjadi 3,0 persen. Perekonomian Eropa juga akan memiliki kondisi perekonomian yang lebih baik, LPE positif sebesar 0,8 persen pada Tahun 2014 diperkirakan akan meningkat menjadi 1,3 persen di Tahun 2015, dan naik menjadi 1,60 persen pada Tahun 2016. Jepang diperkirakan akan tetap tumbuh stabil di angka 0,8 persen, walaupun dalam dua triwulan terakhir pertumbuhan ekonominya mengalami kontraksi sehingga target tersebut masih dalam skenario pesimis. Ekonomi Indonesia diprediksi akan terjadi penurunan pada Tahun 2015 dan naik menjadi 5,50 pada Tahun 2016 (Gambar 2.1).

Kondisi perekonomian Jawa Barat dalam beberapa tahun terakhir selalu sama dengan pertumbuhan ekonomi nasional, prediksi menurunnya kondisi ekonomi nasional di atas merupakan tantangan bagi Jawa Barat dalam melaksanakan pembangunan.

Gambar 2.1.

KONDISI DAN PREDIKSI PEREKONOMIAN DUNIA DAN NASIONAL



Sumber : World Bank, 2016

Jawa Barat sebagai provinsi yang memiliki jumlah penduduk tertinggi di Indonesia yaitu sebesar 46.029.699 jiwa pada Tahun 2014, dengan akan berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Tahun 2015, memerlukan sumber daya manusia Jawa Barat yang berdaya saing tinggi, untuk menghasilkan produk berkualitas yang dapat bersaing dengan negara ASEAN. Disamping itu untuk meningkatkan investasi baik PMA maupun PMDN, memerlukan sinergitas regulasi antara Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Perubahan iklim (*cilmate change*), merupakan tantangan dalam pembangunan Jawa Barat dalam berbagai sektor terutama dalam peningkatan ketahanan pangan. Tantangan tersebut perlu diantisipasi melalui implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung yang pada intinya Jawa Barat harus memenuhi kawasan hutan lindung sebanyak 45% dari luas wilayah Jawa Barat.

Pekan Olah Raga Nasional (PON) XIX Tahun 2016, merupakan even tingkat nasional yang harus diselenggarakan oleh Provinsi Jawa Barat dengan 4 (empat) sukses yaitu sukses penyelenggaraan, ekonomi, prestasi dan administrasi.

Perekonomian Kabupaten Cianjur dipengaruhi oleh perekonomian global, nasional dan provinsi Jawa Barat, dimana Kabupaten Cianjur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketiga wilayah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi yang didorong dengan stimulus APBD Kabupaten Cianjur kepada sektor riil melalui belanja daerah langsung dan tidak langsung diharapkan mampu menggerakkan semua sektor produksi, terutama pertanian dan perdagangan.

Dari sisi penawaran, sektor-sektor perekonomian yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti masih didominasi oleh sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor jasa keuangan, dan sektor jasa-jasa lainnya. Sektor-sektor tersebut merupakan sektor-sektor basis yang diperkirakan masih menjadi *leading sector* pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cianjur pada Tahun 2015 dan 2016. Dominasi sektor-sektor tersebut juga masih akan mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja meskipun belum signifikan sehingga secara bertahap masalah pengangguran dapat dikurangi. Sektor-sektor lain yang diasumsikan dapat tumbuh positif berdasarkan potensi yang ada adalah sektor industri dimana akhir-akhir ini muncul kelompok baru yang dikenal dengan Sektor Industri Kreatif yang dapat menjadi alternatif dalam pengembangan sektor industri dan perdagangan di Kabupaten Cianjur ke depan.

Disamping itu, dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan sekaligus mendorong peningkatan perekonomian, bantuan langsung kepada masyarakat dalam rangka pemberdayaan ekonomi yang sudah berjalan masih diperlukan dan akan terus dilanjutkan, namun pemberian subsidi tersebut akan terus dievaluasi agar lebih tepat sasaran dan lebih selektif. Sementara itu, dalam rangka memenuhi kebutuhan yang penting dan mendesak, pengusulan bantuan baru dimungkinkan dengan memperhatikan bahwa pemberian subsidi merupakan pilihan kebijakan terbaik yang perlu dilakukan, memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, serta dengan mempertimbangkan keterbatasan dana pemerintah daerah. Selain itu wacana pembatasan bahan bakar minyak bersubsidi dan kenaikan tarif dasar listrik akan berpengaruh terhadap kinerja ekonomi kota terutama akan membebani APBD dan berpotensi menekan daya beli masyarakat yang secara eksisting di lapangan harga-harga telah mengalami kenaikan. Perubahan iklim (*climate change*) diperkirakan akan masih berlanjut di tahun 2015 dan 2016 yang juga akan turut mempengaruhi pola tanam petani, maupun siklus pengelolaan air baku, dan yang lebih luas akan berpengaruh pada permasalahan ketahanan pangan.

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan OPD Kabupaten Cianjur pada Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Bulan Juni 2016 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi, perlu dilakukan perubahan program/kegiatan dalam RKPD Tahun 2016, baik berupa pergeseran pagu kegiatan antar OPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

1. Kegiatan Lanjutan RKPD Murni Tahun 2016, Penghapusan Kegiatan, Penambahan Kegiatan Baru/Kegiatan Alternatif.

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap rencana kegiatan di dalam RKPD Tahun 2016, baik judul kegiatan, capaian dan target indikator, pagu indikatif serta lokasi kegiatan masih terdapat ketidak selarasan antara RKPD 2016 dengan APBD 2016. Berkenaan hal tersebut, dalam rangka optimalisasi pelaksanaan RKPD 2016 maka terdapat beberapa kegiatan yang mengalami perubahan baik penambahan anggaran, penambahan kegiatan, penghapusan kegiatan dan pengurangan anggaran.

RKPD Tahun 2016 Kabupaten Cianjur terdiri atas 26 Urusan Wajib dan 8 urusan pilihan yang tertampung dalam untuk perubahan RKPD Tahun 2016 diprioritaskan dalam mengoptimalkan capaian akhir RPJMD 2011-2016 sebagai pijakan dalam capaian RPJMD 2016-2021. Lampiran program dan kegiatan Tabel. 3.1

2. Pergeseran Kegiatan Internal dan Antar OPD.

Penyesuaian program dan kegiatan pada perubahan RKPD Tahun 2016 dilakukan melalui : pergeseran kegiatan berupa pergeseran anggaran antar unit kerja, antar kegiatan, dan antar jenis belanja serta pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian objek belanja. Dari 36 OPD ditambah 32 kecamatan dan 6 kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur yang mengusulkan pergeseran kegiatan untuk perubahan RKPD Tahun 2016 hampir seluruhnya OPD dan beberapa Kecamatan dan Kelurahan.

3. Perubahan Target Kinerja, Pagu Indikatif

a) Perubahan Target Kinerja

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2016 sampai dengan bulan Mei 2016, dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi target kinerja pada RPJMD 2011-2016. Untuk itu perlu dilakukan perubahan program dan kegiatan dalam RKPD Tahun 2016, baik berupa pergeseran pagu kegiatan internal OPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencapai kinerja pembangunan yang realistis dan terukur.

Target Laju pertumbuhan penduduk (LPP) Perubahan RKPD Tahun 2016 diasumsikan naik dibanding dengan target RKPD Murni Tahun 2016. Namun demikian sehubungan dengan asumsi-asumsi perekonomian dunia dan nasional melalui perubahan program dan kegiatan yang direncanakan pada perubahan RKPD Tahun 2016, maka : 1) Target indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) pada perubahan RKPD Tahun 2016 menurun; 2) Inflasi menurun; 3) Nilai PDRB naik; 4) Jumlah penduduk miskin menurun; 5) tingkat pengangguran terbuka turun; dan 6) laju pertumbuhan investasi naik.

Selain capaian indikator makro pada Perubahan RKPD Tahun 2016 di atas, perlu upaya meningkatkan target indikator kinerja daerah melalui : peningkatan kesejahteraan masyarakat; pelayanan umum dan daya saing daerah, yang dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai barometer peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perubahan RKPD Tahun 2015 memuat penyesuaian target IPM, Indeks Pendidikan, AMH, Indeks Kesehatan, AHH, dan *Purchasing Power Parity* (PPP). Target indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Indeks Daya Beli meningkat dibanding pada RKPD Murni Tahun 2016, hal ini dimaksudkan untuk memacu ketertinggalan RLS di tingkat pemerintah pusat dan meningkatkan daya beli serta mengurangi kemiskinan dan pengangguran di tahun 2016.

Perkembangan nilai IPM Kabupaten Cianjur setiap tahun terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2013 IPM meningkat menjadi 70,38 dibandingkan tahun 2012 sebesar 70,02. Berdasarkan nilai komponen pembentukan IPM, nilai indeks pendidikan paling tinggi mencapai 80,64. Nilai indeks pendidikan diturunkan dari angka melek huruf sebesar 98,02 dan rata-rata lama sekolah 45,87. Di urutan berikutnya adalah indeks kesehatan sebesar 69,67 sedangkan nilai komponen terkecil yang terkecil adalah indeks daya beli sebesar 60,83. Indeks kesehatan diturunkan dari angka harapan hidup sebesar 69,67 sedangkan *purchasing power per capita* (PPP) sebesar 623,21. Komponen daya beli inilah yang perlu diakselerasi untuk mendongkrak pencapaian nilai IPM secara keseluruhan.

Pencapaian nilai IPM ini disesuaikan dengan target IPM yang telah ditetapkan dalam RPJMD dimana tahun 2016 target IPM adalah sebesar 71,00-72,00. Walaupun trend pencapaian IPM meningkat setiap tahunnya, akselerasi perlu terus dilakukan melalui program pembangunan yang fokus untuk mendongkrak pencapaian IPM tersebut. Dan berdasarkan RPJMD, target tahun 2015 adalah 70,50-71,50.

Tabel 3.1
Perkembangan IPM Kabupaten Cianjur

No	Komponen IPM	Realisasi IPM ¹					Proyeksi IPM Berdasarkan RPJMD		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014*	2015*	2016**
1	IPM	68,66	69,14	69,59	70,02	70,38	70,00-71,00	70,50-71,50	71,00-72,00
2	Indeks Kesehatan	67,74	68,33	68,92	69,50	69,67	70,59	71,11	71,67
3	Indeks Pendidikan	79,70	80,19	80,27	80,38	80,64	80,94	81,11	81,27
4	Indeks Daya Beli	58,53	58,89	59,38	60,18	60,83	61,23	61,75	62,27
5	Angka Harapan Hidup	67,74	68,33	68,92	69,50	69,67	67,07	67,25	67,07
6	Angka Melek Huruf	97,45	97,55	97,64	97,67	98,02	97,78	97,84	97,90
7	Rata-rata Lama Sekolah	44,21	45,48	45,48	45,80	45,87	7,20	7,36	7,19
8	PPP	613,26	614,83	617,59	620,40	623,21	624,93	627,20	631,42

Sumber : 1. Indikator Inkesra Kabupaten Cianjur Tahun 2014
* Proyeksi dalam RKPD tahun 2014 dan 2015
** Target IPM tahun 2016

b) Perubahan Pagu Indikatif

Akibat dari pergeseran, penghapusan, penambahan, perubahan lokasi dan sasaran, serta penambahan anggaran untuk program dan kegiatan, maka akan terjadi perubahan pagu indikatif perubahan RKPD Tahun 2016. Selain dari perubahan kebutuhan pendanaan tersebut, juga diindikasikan akan terjadi penambahan pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Untuk mengetahui perbedaan antara RKPD Tahun 2016 dan Perubahan RKPD Tahun 2016 digunakan data APBD Murni Tahun 2016 dan rancangan perubahan RKPD Tahun 2016 (Tabel 3.2).

Tabel 3.2
PENDANAAN PERUBAHAN RKPD 2016

URAIAN	APBD 2016 MURNI	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD 2016
Pendapatan Daerah		
Pendapatan Asli Daerah	424.737.689.800,87	80.826.326.050,73
Hasil Pajak Daerah	134.760.440.452,00	134.760.440.452,00
Hasil Retribusi Daerah	23.161.796.594,50	22.369.237.274,50
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.998.748.956,00	8.684.941.248,00

URAIAN	APBD 2016 MURNI	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD 2016
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	258.816.703.798,37	315.011.707.076,23
Dana Perimbangan		
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	78.860.500.000,00	82.935.728.000,00
Dana Alokasi Umum	1.569.946.984.000,00	1.569.946.984.000,00
DAK Fisik	243.519.890.000,00	219.167.901.000,00
DAK Non Fisik		480.773.755.940,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	954.991.563.607,50	575.562.720.367,50
Pendapatan Hibah	-	3.321.185.200,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	193.399.704.667,50	193.399.704.667,50
Dana Penyesuaian	437.416.130.000,00	-
Bantuan Keuangan dari Provinsi	-	98.023.727.500,00
Pendapatan Lainnya	240.412.941.000,00	240.412.941.000,00
DID	40.405.162.000,00	40.405.162.000,00
DAK Non Fisik	43.357.625.940,00	-
Jumlah Pendapatan	3.272.056.627.408,37	3.409.213.415.358,23
Belanja		
Belanja Tidak Langsung	2.260.251.566.742,13	2.193.350.074.964,02
Belanja Pegawai	1.755.176.092.516,03	1.646.292.460.737,92
Belanja Bunga	-	-
Belanja Subsidi	-	-
Belanja Hibah	42.976.036.300,00	58.061.036.300,00
Belanja Bantuan Sosial	2.500.000.000,00	3.645.000.000,00
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	2.199.981.919,00	2.199.981.919,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	451.934.450.862,00	478.686.590.862,00
Belanja Tidak Terduga	5.465.005.145,10	4.465.005.145,10
Belanja Langsung	1.164.413.811.316,24	1.453.896.536.205,33
Belanja Pegawai	59.366.876.700,00	
Belanja Barang dan Jasa	625.952.969.612,24	
Belanja Modal	479.093.965.004,00	
Jumlah Belanja	3.424.665.378.058,37	3.647.246.611.169,35
Surplus/Defisit	(152.608.750.650,00)	(238.033.195.811,12)
Pembiayaan Daerah		
Penerimaan Pembiayaan	162.608.750.650,00	248.033.195.811,12

URAIAN	APBD 2016 MURNI	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD 2016
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	162.608.750.650,00	248.033.195.811,12
Pencairan Dana Cadangan	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-
Penerimaan Piutang Daerah	-	-
Pengeluaran Pembiayaan		
Pembentukan Dana Cadangan	-	-
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang	-	-
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-
Pembayaran Kegiatan Lanjutan	-	-
Pembiayaan Netto	152.608.750.650,00	238.033.195.811,12
SILPA	-	-

4. Rencana Kegiatan Prioritas Daerah

Penetapan prioritas pembangunan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2016 bertujuan untuk memantapkan fokus rencana pembangunan di Kabupaten Cianjur dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Cianjur sesuai dengan indikator kinerja pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2016, terhadap hal-hal yang belum terakomodir dalam RKPD 2016 maupun situasi kekinian yang terjadi. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan berdasarkan perubahan asumsi target indikator pembangunan Kabupaten Cianjur Tahun 2016.

Penetapan prioritas pembangunan daerah dilakukan supaya sumber daya yang tersedia khususnya keuangan daerah dan sumber daya manusia mengakselerasi upaya merespon isu strategis dan permasalahan yang dihadapi Kabupaten Cianjur untuk mencapai visi dan misi RPJMD. Dengan memperhatikan situasi dan kondisi, hasil evaluasi pembangunan Kabupaten Cianjur, serta isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Cianjur pada perubahan Tahun 2016.

Skema Pembangunan Kabupaten Cianjur, sesuai dengan RPJMD, didasarkan pada Rencana Pembangunan Prioritas daerah. Pada tahap implementasi, pertimbangan hasil evaluasi dan kondisi kekinian akan menurunkan "permasalahan kemudian Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan, dimana muaranya akan pada program dan kegiatan, sebagai berikut:

Prioritas pembangunan Kabupaten Cianjur tahun 2016 terdiri dari:

1. Peningkatan kualitas dan layanan pendidikan;
2. Peningkatan kualitas dan layanan kesehatan;
3. Penataan ruang;
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana;
5. Peningkatan infrastruktur wilayah;
6. Peningkatan ketahanan pangan daerah;
7. Peningkatan perekonomian daerah;
8. Peningkatan reformasi pemerintahan;
9. Peningkatan aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah.

Tabel 3.3

Prioritas dan Sasaran Pembangunan beserta Target dalam Perubahan RKPD Tahun 2016

No	Prioritas	Sasaran Pembangunan				OPD Utama	
		Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2016		
1	Peningkatan kualitas dan layanan pendidikan	1.1 Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan	1) Rasio jumlah sekolah PAUD terhadap penduduk usia sekolah PAUD (4-6 tahun) baik formal maupun non formal	Rasio	1 : 91	Dinas Pendidikan	
			2) Jumlah daya tampung pendidikan dini (ruang kelas)	Ruang Kelas	3267		
			3) Rasio jumlah sekolah SD dan SMP terhadap penduduk usia sekolah SD dan SMP (7-15 tahun) baik formal maupun non formal	Rasio	1 : 288		
			4) Jumlah daya tampung SD/SMP	Ruang Kelas	437		
			5) Rasio jumlah sekolah SMA terhadap penduduk usia sekolah SMA (16-18 tahun) baik formal maupun non formal	Rasio	1 : 651		
			6) Jumlah daya tampung SMA/MA/SMK	Ruang Kelas	437		
			7) Persentase jalan desa mantap yang dibangun menuju sarana pendidikan	%	15,72		Dinas PU Bina Marga
			8) Persentase jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV	%	100		Dinas Pendidikan
		1.2 Meningkatkan angka kelulusan siswa untuk seluruh jenjang pendidikan	1) Angka Kelulusan SD/MI	%	100	Dinas Pendidikan	
			2) Angka Kelulusan SMP/MTs	%	100		
			3) Angka Kelulusan SMA/MA/SMK	%	100		
		1.3 Terkendalinya angka mengulang dan drop out di setiap tingkatan dan jenjang	1) Persentase siswa yang naik kelas	%	100	Dinas Pendidikan	
			2) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0		
			3) Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0		

No	Prioritas	Sasaran Pembangunan				OPD Utama
		Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2016	
			4) Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA/SMK	%	0	
			5) Persentase siswa yang melanjutkan	%	100	
	1.4 Meningkatnya mutu kelulusan siswa dari setiap jenjang pendidikan	1) Siswa yang lulus UAS tingkat SD/MI	%	100		Dinas Pendidikan
		2) Persentase siswa yang lulus UAS tingkat SMP/MTs	%	100		
		3) Persentase siswa yang lulus UAS tingkat SMA/MA/SMK	%	100		
	1.5 Tertanamkannya nilai-nilai akhlakul karimah ke dalam pribadi peserta didik	1) Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan ber-karakter	%	100		Dinas Pendidikan
	1.6 Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran siswa dalam antisipasi dan penanggulangan bencana	1) Jumlah sekolah yang terfasilitasi untuk meningkatkan pemahaman keterampilan dan kewaspadaan dalam pencegahan dan penanggulangan bencana	Sekolah	1		BPBD
	1.7 Meningkatnya kualitas pendidikan tinggi lokal	2) Persentase bantuan biaya operasional pendidikan tinggi dari pemerintah daerah	Buah	5		AKPER
	1.8 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan	3) Persentase sekolah yang memiliki komite sekolah	%	100		Dinas Pendidikan
	1.9 Meningkatnya sarana dan prasarana perpustakaan	1) Perpustakaan Desa	Buah	50		Kantor Arpusda
		2) Perpustakaan Mesjid Besar Kecamatan	Buah	11		
		3) Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Eksp	16.682		
		4) Pengunjung perpustakaan	Orang	13.006		
2	Peningkatan Kualitas dan Layanan Kesehatan	2.1 Terwujudnya masyarakat yang proaktif memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, berpartisipasi aktif menolong dirinya, serta membudayakan perilaku	1) Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	57	Dinas Tarkim
			2) Persentase usaha/kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	%	100	

No	Prioritas	Sasaran Pembangunan				OPD Utama
		Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2016	
		hidup bersih dan sehat dalam keluarga dan masyarakat	3) Persentase usaha/kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	%	100	BLHD
		2.2 Meningkatnya kondisi dan kualitas fasilitas layanan prasarana kesehatan	1) Persentase jalan desa mantap menuju sarana kesehatan	%	6,33	Dinas PU Bina Marga
			2) Puskesmas dan jaringannya yang berfungsi dengan baik	%	100	Dinkes
			3) Rasio Rumah Sakit persatuan penduduk	Rasio	1 : 1.000.000	
			4) Kualitas sarana dan prasarana RSUD	%	100	RSUD CIANJUR
			5) Tersedianya Bangunan IGD Terpadu	%	100	RSUD CIMACAN
		2.3 Meningkatnya layanan kesehatan masyarakat	1) Cakupan pertolongan persalinan oleh Bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	90	Dinkes
			2) Prevalensi gizi buruk	%	0,9	
			3) Cakupan desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i>	%	100	
		2.4 Peningkatan ketersediaan pembiayaan kesehatan masyarakat miskin	1) Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	80	
			2) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Kunjungan	281.265	
		2.5 Terjaminnya ketersediaan dan keterjangkauan obat	1) Ketersediaan obat, terutama obat dan alat kesehatan esensial bagi masyarakat miskin	%	95	
		2.6 Terpenuhinya permintaan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas	1) Rata-rata jumlah anak per keluarga	Anak	2,78	BKBPP
			2) Cakupan peserta KB aktif	%	67,20	
		2.7 Meningkatnya pengetahuan kesehatan reproduksi remaja (KRR)	1) Persentase pusat informasi dan konseling (PIK) remaja per kecamatan	%	78	

No	Prioritas	Sasaran Pembangunan				OPD Utama
		Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2016	
		2.8 Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan anak serta peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan	1) Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	%	46	
		2.9 Meningkatkan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak	1) Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan anak dari tindak kekerasan	%	100	
		2.10 Berkembangnya agribisnis yang mampu menghasilkan produk dan industri pertanian yang berdaya saing	1) Nilai produk dan produktivitas per jenis produk pertanian per tahun (ton) : '- Padi	Ton	896,534	Distan
			2) Nilai produk dan produktivitas per jenis produk per tahun : produk perkebunan (ton)			Dishutbun
			- produk perkebunan (ton)	Ton	49.000	
			- produk hhbk (ton)	Ton	611,00	
			3) Jumlah kelompok yang memanfaatkan teknologi tepat guna dalam budidaya : Pertanian	Kelompok	25	Distan
			4) Persentase sawah terairi	%	87,80	Dinas PSDAP
			5) Kondisi Infrastruktur jalan dalam kondisi mantap untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah dalam rangka pengembangan agribisnis	%	11,10	Dinas PU Bina Marga
		2.11 Meningkatnya produksi dan ketersediaan pangan serta berkembangnya mekanisme distribusi dan aksesibilitas pangan	1) Persentase Skor Pola Harapan Pangan	%	64	BKPD
		2.12 Meningkatnya pariwisata daerah berbasis alam dan budaya yang mampu bersaing memenuhi kebutuhan wisatawan	1) Jumlah obyek Wisata dan meningkat sarana dan prasarana	Buah	4	Disbudpar

No	Prioritas	Sasaran Pembangunan				OPD Utama
		Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2016	
		dengan tetap berprinsip pada pembangunan berkelanjutan				
			2) Jumlah kunjungan wisata (orang)	Orang	4	
			3) Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Buah	51	
			4) Persentase infrastruktur jalan dalam kondisi mantap untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah dalam rangka pengembangan pariwisata	%	7,4	Dinas PU Bina Marga
			5) Kondisi infrastruktur jalan/trotoar untuk pengembangan pariwisata (KM)	%	50	
		2.13 Meningkatnya aksesibilitas KUMKM terhadap modal, teknologi dan pasar	1) Persentase koperasi aktif	%	29	Dinas Koperasi UMKM
			2) Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	Unit	0	
			3) Jumlah BPR/LKM aktif (bh)	Unit	0	
			4) Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	0,03	
		2.14 Terwujudnya pengelolaan industri dan perdagangan yang berdaya saing didukung oleh SDA, SDM, sarana dan prasarana serta teknologi tepat guna	5) Prosentase pasar rakyat yang direvitalisasi	%	14,8	Dinas Perindag
			6) Frekuensi pengawasan barang dan jasa ke lapangan	kali	1	
			7) Pelaku usaha industri kecil dan menengah yang dibina (orang)	orang	320	
			8) Pelaku usaha industri kecil dan menengah yang menyerap dan menerapkan teknologi tepat guna (TTG) (Org)	orang	200	Dinas Perindag

No	Prioritas	Sasaran Pembangunan				OPD Utama
		Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2016	
		2.15 Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi	1) Jumlah peningkatan angka investasi	RP Trilyun	124	BPPTPM
			2) Keluarga yang mengikuti Program transmigrasi (KK)	KK	25	Dinsosna kertrans
		2.16 Terwujudnya iklim investasi yang sehat	1) lama proses perijinan (rata-rata)	Hari	5	BPPTPM
			2) Jumlah regulasi yang mendukung iklim usaha	Buah	5	Setda
			3) Persentase tenaga kerja terserap di sektor formal dan informal dibandingkan penduduk usia kerja	%	5	Dinsosna kertran
			4) Peningkatan Penanganan Hubungan Industrial (%)	%	100	Dinsosna kertrans
		2.17 Berkembangnya pemanfaatan dan pengelolaan pesisir dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan	1) Peningkatan produksi perikanan budidaya dan tangkap (ton)	ton	201,758	Disperinak
		2.18 Menguatnya implementasi rencana tata ruang daerah dalam pemanfaatan ruang untuk pengembangan wilayah Kabupaten Cianjur	1) Meningkatnya jumlah kawasan yang memiliki perencanaan teknis ruang yang diPERDAkan	Dokumen	8	BAPPEDA
			2) Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur/Kota	Desa	10	Dinas Tarkim
			3) Ketaatan terhadap RTRW	%	100	BAPPEDA
		2.19 Terwujudnya pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	1) Persentase berkurangnya penambang liar	%	75	Dinas PSDAP
			2) Persentase pengambilan air sesuai dengan perijinan yang berlaku	%	50	
			3) Persentase jumlah rencana usaha/kegiatan dan pembangunan yang dilengkapi dengan dokumen LH (AMDAL/UKL/UPL/SPPL)	Buah	12	BLHD

No	Prioritas	Sasaran Pembangunan			OPD Utama	
		Sasaran	Indikator	Satuan		Target 2016
			4) RTH per satuan luas wilayah perkotaan (rata-rata)	%	1	Dinas Tarkim
			5) Persentase penanganan sampah (%)	%	5	DKP
			6) Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	%	5	
		2.20 Berkembangnya wilayah dengan didukung oleh ketersediaan dan pembangunan infrastruktur yang handal	1) Kondisi infrastruktur jalan mantap untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah (jaringan jalan strategis)	%	18,5	Dinas PU Bina Marga
			2) Rasio Elektrifikasi Kab Cianjur	%	56,00	Dinas PSDAP
			3) Rumah layak huni	Unit	10.112	Dinas Tarkim
			4) Tersedianya data base jalan lingkungan dan jalan setapak	Kecamatan	32	
			5) Persentase terseleenggaranya pelayanan pembangunan gedung pemerintahan	%	80	
			6) Persentase cakupan ketersediaan prasarana perhubungan	%	61,46	Dishub kominfo
			7) Persentase cakupan ketersediaan Dokumen Acuan Bahan Kebijakan Pelayanan Komunikasi dan Informatikal	%	100	
			8) Persentase cakupan ketersediaan dokumen acuan dan database bahan kebijakan perhubungan	%	100	
			9) Persentase cakupan ketersediaan prasarana perhubungan	%	65,52	
			10) Persentase cakupan ketersediaan fasilitas	%	83	
			11) Efektivitas pelayanan angkutan	%	96,67	
			12) Persentase upaya	%	100	

No	Prioritas	Sasaran Pembangunan				OPD Utama
		Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2016	
			perwujudan ketertiban lalu lintas			
			13) Persentase tingkat upaya kelalaian keselamatan kendaraan	%	100	
			14) Persentase cakupan keandalan prasarana dan fasilitas	%	61,46	
			15) Luas Pemakaman Muslim dan non Muslim	-	-	DKP
			16) Luas tanah yang dibebaskan untuk kepentingan umum dan kepentingan sosial	M2	20.000	SETDA
4	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	2.19 Terwujudnya keseimbangan fungsi lahan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup	1) Berkurangnya lahan kritis	ha	1.550	Dishutbun
			2) Cakupan luas kawasan lindung di luar kawasan hutan	%	15,89	
		2.20 Terwujudnya dan terimplementasinya perangkat transformasi budaya birokrasi yang mampu menciptakan sumber daya aparatur yang berbudi luhur, tangguh dan cerdas, terampil, mandiri, memiliki rasa kesetiakawanan, bekerja keras, produktif, inovatif, disiplin, berorientasi pada pembangunan dan masa depan serta berkhak mulia	1) Berkurangnya pelanggaran disiplin PNS (kasus)	Kasus	10	BKPPD
			2) Persentase jumlah pejabat yang sudah mengikuti diklat kepemimpinan	%	80	
			3) Persentase pegawai yang mengikuti diklat prajabatan tepat waktu	%	100	
			4) Jumlah CPNS Menjadi PNS	Org	300	

No	Prioritas	Sasaran Pembangunan				OPD Utama
		Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2016	
			5) Data base kepegawaian Kab. Yang terpelihara	Sistem	1	
			6) Pegawai yang mengikuti diklat teknis (orang)	Org	600	
			7) Anggota Korpri yang terlayani	%	90	Sekretariat Dewan Korpri
			8) Berkurangnya penyalahgunaan barang dan jasa	%	0	BLPBJ
		2.21 Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berorientasi pada peningkatan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien, pemberian pelayanan prima pada masyarakat penyelenggaraan fungsi pemerintahan secara optimal dan perwujudan SDM aparatur yang handal	1) Ketersediaan laporan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel untuk disampaikan ke publik	Ada/tidak	ada	Inspektorat Daerah
			2) Perda APBD tepat waktu	Tgl	31 Des	DPKAD
			3) Perda Pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Tgl	31 Juli	
			4) Peningkatan pernyataan Opini BPK	WTP	WTP	
			5) Rasio belanja tidak langsung (belanja awal) terhadap total belanja daerah	Rasio	59,00	
			6) Rasio belanja langsung terhadap total belanja daerah	Rasio	41,2	
			7) Inventarisasi Aset	%	65	
			8) Meningkatnya pendapatan asli daerah dari sektor pajak	Rp	128.722.646.961	Dinas Perpajakan Daerah
			9) Meningkatnya PAD	Rp	484.167.115594	DPKAD
			10) Tersedianya dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/tidak	Ada	BAPPEDA

No	Prioritas	Sasaran Pembangunan				OPD Utama
		Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2016	
			11) Tersedianya dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/tidak	ada	
			12) Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA;	Ada/tidak	Ada	
		2.22 Meningkatnya profesionalisme birokrasi dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat	1) Ketersediaan pengaturan pembentukan organisasi perangkat daerah hasil restrukturisasi organisasi birokrasi pemerintah kabupaten yang memenuhi kebutuhan pelayanan terbaik bagi warga masyarakat	ada	ada	SETDA
			2) Kepemilikan KTP	%	95,65	Disduk capil
			3) Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	Jiwa	504.91	
			4) Persentase kepemilikan Kartu Keluarga	%	93,11	
			5) Kepemilikan akta catatan sipil	%	51,79	
			6) Aspirasi masyarakat yang direkomendasikan ke pemerintah daerah berupa raperda eksekutif dan raperda inisiatif	Dok	18	Setwan
			7) Persentase lembaga ekonomi perdesaan yang berkembang sesuai target lima tahun ke depan	%	100	SETDA
			8) Persentase pemanfaatan teknologi tepat guna sesuai dengan target lima tahun ke depan (%)	%	-	SETDA
			9) Ketersediaan profil desa yang valid	Dok	-	BPMPD

No	Prioritas	Sasaran Pembangunan				OPD Utama
		Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2016	
			10) Persentase sarana prasarana dasar desa yang memadai melalui partisipasi dan keswadayaan masyarakat perdesaan	%	100	BPMPD
			11) Persentase lembaga/kelompok masyarakat yang berperan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia di perdesaan	%	100	BPMPD
			12) Kebijakan penataan wilayah	Dok	1	SETDA
			13) Kebijakan tentang pemerintahan desa (DOKUMEN)			
			14) Jumlah desa yang dapat menyelenggarakan pemerintahan desa yang sesuai dengan peraturan/perundang undang melalui peningkatan kemampuan sumberdaya manusia/perda/BPD	Desa	177	BPMPD
			15) Jumlah desa yang dapat menyelenggarakan pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan	Desa	354	BPMPD
			16) Persentase jumlah Rukun Tetangga (RT) kreatif	%	100	SETDA
			17) Kebijakan Kerjasama Daerah	Dok	1	SETDA
			18) Kebijakan penyelesaian kasus hukum	Dok	5	SETDA
			19) Kebijakan tentang publikasi Informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Dok	3	SETDA

No	Prioritas	Sasaran Pembangunan				OPD Utama
		Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2016	
			20) Kebijakan dalam bidang koperasi, perdagangan, perindustrian dan pariwisata	dok	1	SETDA SETDA
			21) Kebijakan di bidang pengembangan pertanian dan agribisnis	Dok	1	SETDA
			22) Kebijakan di bidang ketahanan pangan	Dok	1	SETDA
			23) Kebijakan di bidang kehutanan dan perkebunan	Dok	1	SETDA
			24) Kebijakan di bidang pengembangan perikanan dan peternakan	Dok	1	SETDA
			25) Kebijakan di bidang sarana dan prasarana perhubungan	Dok	1	SETDA
			26) Kebijakan di bidang tata ruang dan penyehatan lingkungan	Dok	1	SETDA
			27) Kebijakan di bidang lingkungan hidup dan sumber daya dan pertambangan	Dok	1	SETDA
			28) Kebijakan pembangunan daerah	Dok	1	SETDA
			29) Kebijakan di bidang peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan	Dok	1	SETDA
			30) Kebijakan di bidang pemuda dan olahraga	Dok	1	SETDA
			31) Kebijakan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil	Dok	1	SETDA
			32) Kebijakan di bidang Keluarga Berencana	Dok	1	SETDA
			33) Kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dok	1	SETDA
			34) Kebijakan di bidang Kesehatan	Dok	1	SETDA

No	Prioritas	Sasaran Pembangunan				OPD Utama
		Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2016	
			35) Kebijakan di bidang ketenagakerjaan	Dok	1	SETDA
			36) Kebijakan di bidang sosial	Dok	1	SETDA
			37) Kebijakan di bidang pengelolaan keuangan Daerah	Dok	1	SETDA
			38) Kebijakan di bidang pengelolaan Barang/aset daerah	dok	1	SETDA
			39) Kebijakan di bidang pemerintahan yang baik	Dok	1	SETDA
			40) Kebijakan di bidang Pelayanan publik	Dok	1	SETDA
			41) Kebijakan penyusunan SOP	Dok	5	SETDA
			42) Kebijakan di bidang pengawasan dan akuntabilitas	Dok	-	SETDA
			43) Kebijakan bidang ekonomi dan pembangunan	Dok	-	SETDA
			44) Jumlah OPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku (OPD)	OPD	82	ARPUSDA
			45) Ketersediaan prasarana pengelolaan arsip (unit)	unit	310	ARPUSDA
			46) Jumlah pengelola arsip	Orang	23	ARPUSDA
			47) Meningkatkan pelayanan administrasi	%	100	SETDA
			48) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	SETDA
			49) Meningkatkan SDM aparatur yg profesional dan handal	%	100	SETDA
		2.23 Terwujudnya penegakan hukum, kepastian dan budaya hukum dalam rangka supremasi hukum serta pembinaan kerukunan hidup dalam masyarakat guna pelaksanaan penyelenggaraan	1) Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	Kasus	50	POL PP

No	Prioritas	Sasaran Pembangunan				OPD Utama
		Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2016	
		ketentraman, ketertiban dan kemananan yang kondusif				
			2) Pembinaan masyarakat dalam menciptakan suasana lingkungan yang kondusif	-	-	Sat Pol PP
		2.24 Terwujudnya sinergi antar kelembagaan berkaitan dengan sumber daya serta jaringan teknologi informatika dan komunikasi	1) Cakupan OPD yang dapat akses jaringan informasi	bu	1	Dishub-kominfo
			2) Integrasi Sistem Informasi yang ada di OPD ke dalam (SIG) Kabupaten Cianjur	-	3	BAPPEDA
			3) Cakupan ketersediaan media distribusi informasi (%)	%	100	Dishub-kominfo
			4) Persentase cakupan ketersediaan dokumen acuan bahan kebijakan pelayanan komunikasi dan informatika	%	100	Dishub-kominfo
			5) Tingkat upaya sisnergitas distribusi informasi	%	100	Dishub-kominfo
			6) Persentase cakupan upaya bina jasa pos dan telekomunikasi	%	22	Dishub-kominfo
			7) Jumlah Pengadaan Barang/Jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan	%	0	BLPBJ
			8) Tersedianya pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi	Dok	3	BPBD

No	Prioritas	Sasaran Pembangunan				OPD Utama
		Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2016	
		2.25 Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang optimal	1) Persentase pemenuhan pelayanan kepada OPD	%	100	Kecamatan/ Kelurahan
		2.26 Terwujudnya pemahaman yang meluas dan mendalam pada aparat dan masyarakat kabupaten Cianjur pada nilai-nilai akhlakul karimah	1) Menurunnya jumlah temuan penyalahgunaan APBD	%	0	Inspektorat Daerah
			2) Menurunnya angka perceraian (orang)	org	10	BKPPD
			3) Jumlah zakat, infaq dan sodaqoh (Rp)	Rp	-	SETDA
			4) Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu, pemilukada	%	70	Badan Kesbangpol
		2.27 Pelembagaan penerapan kebijakan aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	1) Ketersediaan kebijakan internalisasi akhlakul karimah	-	3	SETDA
		2.28 Terwujudnya upaya preventif dan kuratif dalam menghadapi permasalahan social	1) Terjaganya ketertarikan masyarakat, ketertiban umum (terhadap pelanggaran dan kondisi trantibum) (Lokasi)	Kecamatan	32	Satpol PP
			2) Persentase PMKS yang dibina	%	25	Dinsos nakertrans
			3) Persentase PSKS yang dibina	%	100	Dinsos nakertrans
			4) Persentase pencegahan penanggulangan bencana alam dan kebakaran sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang undangan yang berlaku (%)	%	100	BPBD

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 Kabupaten Cianjur merupakan hasil evaluasi dari dokumen Perubahan RKPD, Perubahan APBD Triwulan II Tahun 2016, serta dengan memperhatikan kondisi makro perekonomian, tantangan dan permasalahan Kabupaten Cianjur di Tahun 2016.

Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2016 berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Perubahan RKPD Tahun 2016 sebagai dokumen rencana operasional Tahun 2016, dengan memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek Tahun 2016.

Perubahan RKPD Tahun 2016 harus menjadi acuan dalam penyempurnaan Rencana Kerja (RENJA) OPD, Perubahan KU-APBD, dan PPAS untuk Tahun 2016, yang dijabarkan dalam program dan kegiatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.

Untuk kesinambungan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas Tahun 2016 dalam pencapaian target akumulasi RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2016 dan landasan capaian kinerja pada RPJMD selanjutnya, maka seluruh OPD Kabupaten Cianjur dan *stakeholder* pembangunan di Kabupaten Cianjur berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2016.

Perubahan RKPD Tahun 2016 diprioritaskan untuk pemenuhan Janji Bupati, pencapaian target akumulasi RPJMD 2011-2016 untuk Tahun 2016 dengan kegiatan prioritas pembangunan daerah sebagai target capaian kinerja pembangunan Kabupaten Cianjur.

Target Kinerja pembangunan Kabupaten Cianjur yang ingin dicapai melalui perubahan RKPD Tahun 2016, diantaranya adalah:

1. Kesejahteraan Masyarakat
 - a. Tercapainya Indeks Pendidikan sebesar 80,91 poin, diprioritaskan untuk mencapai Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 7,1 tahun;
 - b. Dimulainya persiapan alih kelola SMA/SMK ke Provinsi;
 - c. Meningkatnya daya beli masyarakat sebesar Rp 631.420/bulan;
 - d. Tercapainya Indeks Kesehatan yang diprioritaskan sebesar 70,79-71,79 poin;
 - e. Menurunnya penduduk kemiskinan menjadi kurang 13%.
2. Daya Saing Daerah
 - a. Nilai Investasi yang harus dicapai pada akhir tahun 2016 sebesar Rp. 134 Triliun;
 - b. Indeks Daya Beli mencapai 62,30 poin;

- c. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5 - 6% per tahun;
 - d. Melanjutkan pembangunan/pengembangan destinasi wisata;
 - e. Meningkatkan branding ketertarikan wisatawan ke objek daerah tujuan wisata Kabupaten Cianjur;
3. Pelayanan Umum
- a. Pemeliharaan RKB untuk SD, SMP/MTS baik negeri dan swasta;
 - b. Pemeliharaan Puskesmas DTP (Dengan Tempat Perawatan);
 - c. Meningkatkan produksi pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan;
 - d. Meningkatkan rehabilitasi lahan kritis.
4. Hal-hal khusus lainnya
- a. Dimulainya pelaksanaan persiapan pembangunan perkantoran pemerintahan di wilayah Kecamatan Campaka;
 - b. Dimulainya pembangunan jalan lintas perkotaan untuk menghindari kemacetan;
 - c. Dimulainya pembangunan jalan akses menuju destinasi wisata;
 - d. Selesaiannya pembangunan Gedung Dekranasda;
 - e. Dukungan penyelenggaraan pembangunan keagamaan;
 - f. Melanjutkan penanganan pembangunan eks Pasar Induk;
 - g. Pengadaan lahan untuk pembangunan unit gedung-gedung pemerintahan;
 - h. Dukungan penyelenggaraan status Rumah Sakit Pagelaran;
 - i. Pencegahan dan penanganan korban penyalahgunaan Napza, Miras, HIV AIDS, dan Pelecehan Seksual;
 - j. Peningkatan tata kelola pemerintahan Kabupaten Cianjur;
 - k. Melanjutkan pembangunan jalan poros desa perbatasan antar kecamatan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 29 Juli 2016
BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR